

## **PENGUATAN KAPASITAS RELAWAN BENCANA MELALUI POSKO PELATIHAN PENGETAHUAN KEBENCANAAN (PAS WACANA P3K) DI KABUPATEN OKU SELATAN**

**Uliyati Liska<sup>1</sup>, Eva Novaria<sup>2</sup>, Farhat<sup>3</sup>, Suhaila<sup>4</sup>, Ahmad Yusuf<sup>5</sup>**  
BPBD Kabupaten OKU Selatan<sup>1</sup>, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan<sup>3,4,5</sup>, Stisipol  
Candradimuka<sup>2</sup>  
e-mail: [uliyatiliska27@gmail.com](mailto:uliyatiliska27@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko bencana di Kabupaten OKU Selatan serta adanya kesenjangan kapasitas yang signifikan pada sumber daya manusia penanggulangan bencana, baik di lembaga resmi (BPBD) maupun di kalangan relawan komunitas yang belum terorganisir. Kesenjangan ini menghambat efektivitas mitigasi dan edukasi kebencanaan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses dan keberhasilan penguatan kapasitas relawan melalui sebuah proyek perubahan inovatif bernama Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (PASWACANA P3K). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif terhadap proses kepemimpinan dan implementasi proyek. Temuan utama menunjukkan bahwa inisiatif ini berhasil berkat kepemimpinan strategis yang mampu mengamankan legitimasi internal dan mengorkestrasi kolaborasi model multi-helix, yang puncaknya adalah pembentukan Forum Relawan OKU Selatan Siaga (ForOKUSS). Program pelatihan ini secara efektif meningkatkan keterampilan relawan yang kemudian langsung diaplikasikan dalam kegiatan edukasi masyarakat. Disimpulkan bahwa model P3K merupakan solusi inovatif yang berhasil menjembatani kesenjangan kapasitas dengan memberdayakan potensi lokal, mengubah relawan dari sekadar tenaga responsif menjadi agen mitigasi proaktif, dan menawarkan cetak biru yang terbukti efektif untuk membangun ketangguhan komunitas.

**Kata Kunci:** *Penguatan Kapasitas, Relawan Bencana, Kolaborasi Multi-helix*

### **ABSTRACT**

This research is motivated by the high disaster risk in South OKU Regency and the significant capacity gaps in human resources for disaster management, both within official institutions (BPBD) and among unorganized community volunteers. This gap hinders the effectiveness of disaster mitigation and education. The focus of this research is to analyze the process and success of strengthening volunteer capacity through an innovative change project called the Disaster Knowledge Training Post (PASWACANA P3K). Using a qualitative approach with a descriptive case study design, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and participant observation of the project's leadership and implementation processes. Key findings indicate that this initiative was successful thanks to strategic leadership that secured internal legitimacy and orchestrated a multi-helix collaboration model, culminating in the formation of the South OKU Siaga Volunteer Forum (ForOKUSS). This training program effectively improved the volunteers' skills, which were then directly applied in community education activities. It is concluded that the First Aid (P3K) model is an innovative solution that successfully bridges the capacity gap by empowering local potential, transforming volunteers from mere responsive forces into proactive mitigation agents, and offering a proven blueprint for building community resilience.

**Keywords:** *Capacity Building, Disaster Volunteers, Multi-helix Collaboration*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebuah wilayah administrasi yang terbagi atas 19 kecamatan serta mencakup 252 desa dan 7 kelurahan, memiliki profil risiko bencana yang signifikan dan kompleks. Berdasarkan data historis dan analisis ilmiah yang telah divalidasi melalui Kajian Risiko Bencana (KRB) daerah, teridentifikasi tujuh jenis ancaman utama yang berpotensi melanda wilayah ini, meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung, hingga banjir bandang. Data yang terhimpun secara sistematis oleh Pusat Pengendalian Data dan Laporan (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU Selatan, yang juga terintegrasi dengan sistem di tingkat provinsi dan pusat, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan selama tujuh tahun terakhir. Dari seluruh potensi ancaman tersebut, kejadian bencana hidrometeorologi, khususnya tanah longsor dan banjir, tercatat sebagai peristiwa yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak paling parah. Frekuensi kejadian yang tinggi ini tidak hanya menyebabkan kerugian material yang besar, tetapi juga telah berulang kali merenggut korban jiwa, menjadikannya sebagai prioritas utama dalam agenda manajemen risiko bencana di tingkat lokal (Kuswanto et al., 2019; Zain, 2022).

Kerentanan wilayah terhadap bencana bukanlah sekadar konsep teoretis, melainkan sebuah realitas pahit yang telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Salah satu peristiwa tragis yang menggarisbawahi urgensi mitigasi adalah bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Sungai Are pada bulan November 2017. Kejadian ini tidak hanya merusak sejumlah rumah warga tetapi juga menyebabkan hilangnya enam nyawa. Analisis pasca-bencana dari database kebencanaan menunjukkan bahwa sebagian besar rumah korban berada di lokasi yang sangat rentan, yakni di bawah tebing curam (Hastanti, 2020). Insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga sekaligus pengingat keras bahwa kesadaran akan risiko di lingkungan sekitar merupakan fondasi utama untuk membangun budaya keselamatan. Peristiwa tersebut secara nyata mendemonstrasikan bahwa pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat adalah variabel krusial yang dapat membedakan antara kehidupan dan kematian saat bencana melanda, mendorong perlunya intervensi yang lebih proaktif dalam edukasi dan penataan ruang yang berbasis risiko.

Potensi keberulangan bencana di masa depan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diantisipasi secara cermat. Analisis risiko tidak hanya bertumpu pada data historis kejadian bencana yang telah terjadi, seperti yang tercatat dalam Database Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tetapi juga harus mampu memproyeksikan ancaman yang belum termanifestasi. Untuk itu, pendekatan modern yang memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi instrumen vital (Virtriana et al., 2022). Melalui SIG, pemetaan potensi bencana dapat dilakukan secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai parameter bahaya dan kondisi kerentanan spasial daerah (Paramata et al., 2025; Uy et al., 2020). Penggunaan teknologi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mendorong penerapan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap siklus penanggulangan bencana. Dengan demikian, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dapat dirancang secara lebih terarah dan efektif, menargetkan lokasi-lokasi spesifik yang memiliki tingkat risiko tertinggi berdasarkan analisis multifaktor yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Chen et al., 2022).

Sebagai respons terhadap mandat konstitusional tersebut, struktur kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia telah dirancang secara hierarkis dan terkoordinasi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga komando di tingkat pusat, sementara di tingkat daerah, tanggung jawab ini diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik di

level provinsi maupun kabupaten/kota. Hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinatif dan teknis, memastikan keselarasan strategi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh negeri. Di Kabupaten OKU Selatan sendiri, BPBD dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 dengan tiga fungsi utama: komando, koordinator, dan pelaksana. Keberadaan lembaga ini merupakan implementasi dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub-urusan bencana, yang bertujuan menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman bencana yang ada di wilayah tersebut (Aisyah et al., 2023; Rafii, 2021).

Meskipun kerangka kelembagaan telah terbentuk secara ideal, tantangan signifikan justru muncul dari aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi motor penggerak utama di lapangan. Saat ini, BPBD Kabupaten OKU Selatan didukung oleh 43 personel, yang terdiri dari 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 22 tenaga non-ASN. Namun, data internal menunjukkan kesenjangan kapasitas yang sangat kentara, di mana hanya 9 orang ASN dan 5 tenaga non-ASN yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan. Lebih lanjut, partisipasi dalam pelatihan tersebut bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Kesenjangan kompetensi ini diperparah oleh berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran untuk pelatihan berbayar, kendala waktu, serta faktor internal individu seperti usia dan kesulitan beradaptasi dengan metode pembelajaran modern (Lee, 2023; Subroto et al., 2023). Kondisi ini secara langsung melemahkan efektivitas operasional BPBD dalam menjalankan siklus manajemen bencana yang kompleks, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana.

Problem kapasitas SDM tidak hanya terbatas pada aparatur internal BPBD, tetapi juga meluas ke ekosistem relawan kebencanaan di tingkat masyarakat. Komunitas-komunitas relawan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten OKU Selatan hingga kini belum terorganisir secara optimal dalam sebuah wadah yang terstruktur. Fragmentasi ini menghambat pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas bersama dan sinergi antar-komunitas. Akibatnya, upaya penyebarluasan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada masyarakat menjadi tidak maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Padahal, kegiatan KIE merupakan salah satu program inti dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan membangun ketangguhan masyarakat (Marbi & Widayat, 2025; Suradi et al., 2022). Ketiadaan platform yang terintegrasi untuk para relawan ini menciptakan kekosongan dalam rantai mitigasi berbasis komunitas, di mana potensi besar dari partisipasi publik belum dapat dimobilisasi secara efektif untuk mengurangi risiko bencana secara kolektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah rentan.

Menjawab kompleksitas permasalahan yang ada, mulai dari tingginya risiko bencana, kesenjangan kapasitas SDM di lembaga resmi, hingga belum terorganisirnya potensi relawan, maka diperlukan sebuah terobosan inovatif. Penelitian ini mengajukan gagasan pembentukan Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (P3K) sebagai sebuah solusi strategis. P3K dirancang sebagai sebuah media belajar bersama yang fleksibel, inklusif, dan berkelanjutan, yang berfungsi sebagai wadah bagi para *trainer* berpengalaman untuk menyalurkan ilmunya serta bagi para relawan dari berbagai komunitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen bencana. Inovasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan kompetensi yang ada dan mengorganisir potensi relawan secara sistematis. Luaran utama dari inisiatif ini adalah terciptanya sebuah *database* relawan yang terlatih, terampil, dan siap diterjunkan ke masyarakat. Keberadaan relawan yang kompeten ini akan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi, terutama dalam memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara masif di daerah-daerah rawan bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam, holistik, dan kontekstual terhadap fenomena yang kompleks, yaitu proses kepemimpinan dalam implementasi sebuah proyek perubahan (*change project*) di lingkungan birokrasi. Studi kasus ini berfokus pada inisiatif "Penguatan Kapasitas Relawan Bencana Melalui Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (Pas Wacana P3K)" di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang *project leader* beserta timnya. Subjek penelitian atau informan kunci (*key informants*) dipilih secara *purposive*, terdiri dari *project leader* itu sendiri, mentor, *coach*, serta anggota Tim Efektif yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pemilihan subjek didasarkan pada peran sentral mereka dalam proyek, sehingga pengalaman dan perspektif mereka dianggap paling relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan strategi triangulasi untuk memastikan kekayaan dan validitas data. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam semi-terstruktur (*semi-structured interview*) dengan seluruh informan kunci. Wawancara ini dipandu oleh sebuah pedoman wawancara (*interview guide*) yang dirancang untuk mengeksplorasi tema-tema seperti pembangunan integritas, pengelolaan budaya kerja, strategi kolaborasi, serta tantangan dalam pengambilan keputusan. Teknik kedua adalah analisis dokumen (*document analysis*), di mana peneliti mengkaji berbagai dokumen relevan seperti Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Efektif, notulensi rapat, laporan kemajuan (*progress reports*), dan dokumen perencanaan proyek. Teknik ketiga adalah observasi partisipatif (*participant observation*), di mana peneliti terlibat dalam beberapa kegiatan proyek seperti rapat koordinasi dan sesi pelatihan untuk mengamati secara langsung dinamika tim, gaya kepemimpinan, dan proses kolaborasi yang terjadi dalam konteks alaminya. Seluruh data verbal dan observasi didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio dan catatan lapangan (*field notes*).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama yang berjalan secara simultan. Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), yang melibatkan proses transkripsi wawancara, seleksi, dan pengkodean (*coding*) data dari catatan lapangan serta dokumen. Data yang terkumpul diorganisasikan ke dalam tema-tema yang relevan dengan proses kepemimpinan, seperti integritas, manajemen tim, dan kolaborasi *stakeholder*. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau bagan alur untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar-tema. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), di mana peneliti menginterpretasikan data secara mendalam untuk membangun pemahaman utuh mengenai kasus yang diteliti. Untuk menjaga kredibilitas temuan, dilakukan proses *member checking* dengan mengonfirmasi interpretasi awal kepada *project leader*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Proses Perencanaan dan Konsolidasi Internal Aksi Perubahan

Implementasi aksi perubahan "Penguatan Kapasitas Relawan Bencana Melalui Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (PASWACANA P3K)" di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan diawali dengan serangkaian langkah strategis yang terencana. Tahap Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

pertama, yang dilaksanakan pada minggu pertama Mei 2025, adalah melakukan konsultasi dan pelaporan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten OKU Selatan selaku mentor. Dalam pertemuan ini, dipaparkan hasil evaluasi seminar proposal dan inovasi yang akan dijalankan, serta permohonan dukungan penuh untuk kelancaran program. Persetujuan dan arahan dari mentor menjadi landasan fundamental untuk memulai tujuh *milestone* jangka pendek yang telah dirancang. Proses ini memastikan bahwa aksi perubahan selaras dengan visi organisasi dan mendapatkan legitimasi dari pimpinan tertinggi, sehingga seluruh sumber daya internal dapat dimobilisasi secara efektif untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan, dengan fokus awal pada Kecamatan Sindang Danau yang rawan longsor.

Menindaklanjuti arahan mentor, langkah krusial berikutnya adalah pembentukan tim efektif internal pada tanggal 8 Mei 2025, yang kemudian dilegalkan melalui Surat Keputusan Kalaksa BPBD No. T-100.3.3/33/KPTS-SEKSI PENC/2025. Tim ini, yang terdiri dari project leader dan pokja sekretariat, segera mempelajari peluang dan tantangan serta merumuskan tugas masing-masing anggota sesuai jadwal. Rapat koordinasi internal pun digelar untuk memantapkan pemahaman tim mengenai tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam rapat ini, dilakukan pembagian tugas yang jelas untuk pelaksanaan tujuh tahapan jangka pendek, memastikan setiap anggota memahami perannya. Seluruh hasil diskusi dan kesepakatan didokumentasikan secara rinci dalam notulen rapat, daftar hadir, dan dokumentasi foto, yang menjadi bukti akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan di awal implementasi aksi perubahan ini.

## **2. Pelibatan Multi-pihak dan Pembentukan Komunitas Belajar**

Setelah fondasi internal terbentuk, aksi perubahan diperluas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal melalui rapat koordinasi multihelik pada 23 Mei 2025. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati OKU Selatan ini berhasil menghimpun partisipasi dari unsur pemerintah (OPD terkait, TNI, Polri), dunia usaha (perbankan dan perusahaan swasta), akademisi, media, serta berbagai organisasi masyarakat dan komunitas. Rapat ini menjadi platform strategis untuk menyinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mensosialisasikan rencana pembentukan Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (P3K). Keterlibatan aktif dari berbagai pihak sejak awal tidak hanya memberikan dukungan sumber daya yang beragam, tetapi juga membangun rasa kepemilikan bersama terhadap program, yang esensial untuk keberlanjutan dan efektivitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten secara terpadu dan kolaboratif.

Sebagai tindak lanjut konkret dari rapat multihelik, dibentuklah sebuah wadah komunitas belajar bernama Forum Relawan OKU Selatan Siaga (ForOKUSS). Forum ini menyatukan berbagai komunitas relawan yang ada, seperti Santri Tanggap Bencana (Santana), SENKOM, ORARI, dan Pramuka, dalam satu platform untuk berbagi ilmu dan pengetahuan manajemen bencana. Pemanfaatan teknologi digital melalui grup WhatsApp dan Google Forms digunakan untuk mempermudah komunikasi dan menjaring data 26 calon relawan yang akan menjadi *pilot project*. Keberadaan ForOKUSS kemudian dilegalisasi melalui SK Bupati OKU Selatan Nomor 537 tanggal 28 Mei 2025. Langkah ini secara efektif mentransformasi inisiatif menjadi sebuah gerakan terstruktur, dengan Posko Pelatihan (P3K) yang didirikan di Kecamatan Sindang Danau sebagai pusat pengembangan kapasitas relawan di daerah rawan bencana.

## **3. Implementasi Pelatihan dan Diseminasi Pengetahuan**

Tahap inti dari aksi perubahan ini adalah pelaksanaan serangkaian sosialisasi dan kegiatan pelatihan yang terstruktur di Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (P3K) selama bulan Juni 2025. Tim efektif internal menyusun jadwal dan materi pelatihan yang komprehensif, mencakup sesi dalam dan luar ruangan. Materi yang diberikan sangat beragam, Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

mulai dari manajemen dasar bencana, profil dan peralatan PB, peran komunitas, pendampingan penyintas, *water rescue*, komunikasi radio, hingga mitigasi vegetatif dan simulasi penanggulangan bencana. Proses pelatihan ini didukung oleh para *trainer* bersertifikat dari internal BPBD maupun komunitas, yang secara sukarela berbagi ilmu dan pengalaman. Seluruh kegiatan didokumentasikan dengan lengkap, mulai dari daftar hadir, foto kegiatan, hingga materi yang dapat diakses melalui *barcode*, menunjukkan proses peningkatan kapasitas yang sistematis dan terukur bagi 26 relawan terpilih.

Hasil dari pelatihan di P3K tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individu relawan, tetapi langsung diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas. Para relawan yang telah terlatih menjadi agen penyebaran informasi kebencanaan, sejalan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub-urusan bencana. Mereka secara aktif melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, MTs, hingga SMA di Kabupaten OKU Selatan. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan juga dilaksanakan langsung di tengah masyarakat, seperti di Kecamatan Banding Agung. Langkah diseminasi ini membuktikan bahwa P3K tidak hanya mencetak relawan terampil, tetapi juga secara proaktif membangun budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan di seluruh lapisan masyarakat.



**Gambar 1. Foto kegiatan mitigasi vegetatif**

Gambar 1 merupakan salah satu kegiatan pelatihan mitigasi vegetatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BPBD, ATAS, dan masyarakat lokal, dalam upaya mengurangi risiko bencana. Para peserta terlihat sedang menanam bibit pohon di lereng bukit yang gundul, sebuah metode efektif untuk mencegah erosi tanah dan tanah longsor, terutama di daerah yang rawan. Latar belakang pegunungan yang hijau menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan peran vital vegetasi dalam stabilitas lereng. Inisiatif semacam ini tidak hanya meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pelestarian lingkungan, tetapi juga membekali komunitas dengan keterampilan praktis untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman bencana alam. Kegiatan pelatihan ini menjadi contoh nyata dari kolaborasi multi-pihak dalam membangun ketangguhan daerah.

#### 4. Manfaat, Keberlanjutan, dan Pengembangan Kompetensi

Aksi perubahan PASWACANA P3K memberikan manfaat signifikan yang dirasakan secara berlapis. Bagi personil relawan, program ini secara langsung meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesiapsiagaan, dan kepercayaan diri dalam menghadapi bencana. Bagi organisasi BPBD, terbentuknya database relawan terlatih dan terampil meningkatkan efektivitas penanganan bencana, memperkuat kapasitas organisasi, serta mendukung pencapaian target SPM. Manfaat terbesar dirasakan oleh masyarakat, yang kini memiliki

sumber daya manusia lokal yang sigap dan teredukasi. Peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan di tingkat komunitas pada akhirnya mempercepat respons saat terjadi bencana, mengurangi risiko, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem penanggulangan bencana daerah, mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh, tanggap, dan tangkas.

Keberlanjutan aksi perubahan ini dijamin melalui peta jalan yang jelas untuk jangka menengah dan panjang, serta didukung oleh komitmen pimpinan. Rencana jangka menengah (6 bulan-1 tahun) mencakup evaluasi kegiatan, pembaruan database relawan, dan pembentukan P3K di kecamatan rawan bencana lainnya. Sementara itu, target jangka panjang (>1 tahun) adalah memperluas P3K ke wilayah dengan potensi risiko bencana lain seperti banjir dan karhutla. Inovasi ini secara inheren terkait dengan pengembangan kompetensi manajemen pemerintahan, di mana setiap tahapan—mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi—merupakan siklus berkelanjutan. Dengan demikian, PASWACANA P3K bukan sekadar proyek sesaat, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi untuk terus mencetak relawan kompeten dan membudayakan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten OKU Selatan.

## Pembahasan

Keberhasilan implementasi Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (P3K) di Kabupaten OKU Selatan secara fundamental menegaskan bahwa inovasi dalam birokrasi tidak hanya bergantung pada gagasan, tetapi pada eksekusi kepemimpinan yang strategis. Penelitian ini menyoroti bagaimana inisiatif ini bukan sekadar program pelatihan biasa, melainkan sebuah *change project* yang dikelola secara cermat. Langkah awal yang dilakukan *project leader* dalam mengamankan persetujuan dan legitimasi dari mentor serta melegalkan tim efektif melalui Surat Keputusan merupakan fondasi krusial. Proses ini mengilustrasikan bahwa dukungan institusional formal adalah prasyarat untuk memobilisasi sumber daya dan mengatasi potensi resistensi internal. Analisis terhadap proses ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah aksi perubahan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam menavigasi struktur birokrasi, mengubah ide personal menjadi program organisasional yang sah, dan memastikan adanya keselarasan antara inovasi dengan visi pimpinan. Hal ini memperkuat argumen bahwa kepemimpinan yang efektif adalah katalisator utama dalam mewujudkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan di sektor publik, khususnya dalam konteks kebencanaan yang dinamis (Julianti & Frinaldi, 2025; Sendika & Frinaldi, 2025).

Model kolaborasi *multi-helix* yang diorkestrasi dalam proyek ini menjadi salah satu temuan paling signifikan, menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada pemerintah menjadi kemitraan multi-pihak. Rapat koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas bukan hanya seremonial, tetapi menjadi titik lebur berbagai sumber daya dan kompetensi. Implikasinya sangat luas: penanggulangan bencana diakui sebagai tanggung jawab bersama, bukan lagi beban tunggal BPBD. Keterlibatan sektor swasta membuka peluang dukungan dana dan logistik, media memperkuat diseminasi informasi, sementara akademisi dapat menyumbangkan kajian berbasis riset. Pembentukan Forum Relawan OKU Selatan Siaga (ForOKUSS) adalah manifestasi nyata dari model ini, menciptakan sebuah ekosistem penanggulangan bencana yang solid dan mandiri. Keberhasilan ini menawarkan sebuah *blueprint* bahwa sinergi antar pemangku kepentingan, jika dikelola dengan baik, dapat membangun *sense of ownership* kolektif yang menjadi kunci keberlanjutan program melampaui siklus proyek dan anggaran pemerintah (Astuti et al., 2025; Pratama & Frinaldi, 2025; Ulfa & Frinaldi, 2025).

Inisiatif P3K secara langsung menjawab kesenjangan kapasitas sumber daya manusia yang diidentifikasi pada bagian pendahuluan. Program ini tidak hanya mengatasi masalah Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan



kurangnya pelatihan bagi aparatur BPBD dan relawan, tetapi juga menyelesaikan isu fragmentasi komunitas yang selama ini menghambat koordinasi. Dengan memanfaatkan *trainer* internal dari BPBD dan komunitas yang telah bersertifikat, P3K menjadi model pelatihan yang berbiaya rendah, berkelanjutan, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini membuktikan bahwa peningkatan kapasitas tidak selalu memerlukan intervensi eksternal yang mahal. Implikasinya adalah pemberdayaan potensi lokal; setiap daerah memiliki *local champions* atau ahli-ahli di bidangnya yang jika diberi platform yang tepat, dapat menjadi agen transfer pengetahuan yang efektif. P3K berfungsi sebagai platform tersebut, menciptakan siklus pembelajaran mandiri di dalam komunitas. Model ini sangat relevan untuk direplikasi di daerah lain yang menghadapi keterbatasan anggaran namun memiliki semangat kerelawanan yang tinggi (Tohoni et al., 2023).

Salah satu aspek terpenting dari temuan penelitian ini adalah adanya hubungan langsung antara pelatihan di P3K dengan aksi nyata di masyarakat. Program ini tidak berhenti pada sertifikasi atau peningkatan pengetahuan pasif, melainkan mendorong para relawan untuk segera mengaplikasikan ilmunya melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Langkah diseminasi ke sekolah-sekolah dan komunitas ini secara efektif memenuhi salah satu mandat utama dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub-urusran bencana. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif dari bawah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target kinerja pemerintah daerah. Implikasinya adalah peran relawan ditransformasikan dari sekadar tenaga responsif saat darurat menjadi agen mitigasi proaktif di masa damai. Mereka menjadi ujung tombak dalam membangun budaya sadar bencana, yang pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi kerentanan masyarakat secara keseluruhan (Ali & George, 2021; Kinanthi, 2022).

Pemanfaatan teknologi sederhana seperti grup WhatsApp dan Google Forms dalam mengorganisir ForOKUSS dan menjaring data relawan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya adaptasi digital dalam manajemen komunitas. Meskipun terlihat sepele, penggunaan *digital tools* ini terbukti sangat efektif dalam mempercepat komunikasi, menyederhanakan administrasi, dan menjaga keterhubungan antar anggota yang tersebar di berbagai wilayah. Temuan ini menggarisbawahi bahwa transformasi digital dalam konteks kerelawanan tidak harus berarti mengadopsi platform yang canggih dan mahal. Justru, pemanfaatan teknologi yang sudah akrab dan mudah diakses oleh masyarakat luas memiliki daya ungkit yang lebih besar. Implikasi dari praktik ini adalah bahwa hambatan geografis dan birokrasi dapat diminimalkan melalui solusi digital yang cerdas dan hemat biaya, memungkinkan pembentukan jejaring relawan yang lebih lincah, responsif, dan terkoordinasi dengan baik dalam menghadapi dinamika kebencanaan yang cepat berubah (Dalimunthe et al., 2024; Habibani & Frinaldi, 2025).

Fokus penelitian pada proses kepemimpinan berhasil mengungkap bahwa keberhasilan P3K tidak terlepas dari kapabilitas *project leader* dalam memainkan peran multifaset. Pemimpin aksi perubahan ini tidak hanya bertindak sebagai manajer proyek yang mengeksekusi rencana, tetapi juga sebagai negosiator ulung yang membangun koalisi dengan berbagai pihak, fasilitator yang menyatukan beragam komunitas, dan integrator yang menyelaraskan program dengan kebijakan daerah. Kemampuan untuk mengelola dinamika internal birokrasi sambil secara simultan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan eksternal menunjukkan tingkat kecerdasan emosional dan sosial yang tinggi (Kardinasari et al., 2019; Sendika & Frinaldi, 2025). Implikasi temuan ini bagi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara adalah perlunya penekanan yang lebih besar pada pengembangan *soft skills* seperti komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan adaptif. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa



di era pemerintahan modern, inovasi sektor publik lebih sering digerakkan oleh pemimpin yang mampu menginspirasi dan berkolaborasi daripada yang hanya mengandalkan otoritas formal.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Sebagai sebuah studi kasus (*case study*) deskriptif tunggal yang berfokus pada satu inisiatif di Kabupaten OKU Selatan, temuan yang dihasilkan memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi. Keberhasilan yang diamati mungkin sangat dipengaruhi oleh konteks lokal yang unik, termasuk karisma *project leader* dan dukungan kuat dari pimpinan daerah, yang mungkin tidak dapat direplikasi dengan mudah di wilayah lain. Selain itu, penelitian ini mengukur keberhasilan pada tahap implementasi awal dan manfaat jangka pendek. Dampak jangka panjang dari P3K terhadap penurunan angka risiko bencana atau peningkatan efektivitas respons saat terjadi bencana sesungguhnya belum dapat dievaluasi. Perspektif yang digali juga lebih dominan berasal dari penyelenggara program, sehingga studi lanjutan yang melibatkan evaluasi mendalam dari para relawan dan masyarakat penerima manfaat akan memberikan gambaran yang lebih holistik dan seimbang (Ernawati et al., 2025; Natalia & Supardal, 2025).

Sebagai penutup, temuan dari penelitian ini menawarkan implikasi penting bagi kebijakan dan riset di masa depan. Bagi para pembuat kebijakan di tingkat daerah, model P3K dapat diadopsi sebagai sebuah pendekatan yang efisien dan efektif untuk mengaktifkan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sangat direkomendasikan agar pemerintah daerah secara formal mengintegrasikan model kolaborasi *multi-helix* dalam peraturan daerah tentang penanggulangan bencana untuk memastikan keberlanjutannya. Dari sisi akademis, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada studi longitudinal untuk mengukur dampak kuantitatif dari program sejenis terhadap indeks ketangguhan daerah. Studi komparatif antara beberapa daerah yang menerapkan model ini juga akan sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang bersifat universal. Pada intinya, inisiatif PASWACANA P3K telah memberikan sebuah model kerja yang terbukti dan dapat menjadi inspirasi bagi penguatan kapasitas relawan di seluruh Indonesia.

## KESIMPULAN

Keberhasilan implementasi Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (P3K) di Kabupaten OKU Selatan secara fundamental menegaskan bahwa inovasi di sektor publik digerakkan oleh kepemimpinan yang strategis dan kolaborasi multi-pihak. Analisis menunjukkan bahwa fondasi keberhasilan proyek ini diletakkan oleh kemampuan *project leader* dalam menavigasi birokrasi untuk mendapatkan legitimasi formal dan membentuk tim yang solid. Namun, temuan yang paling signifikan adalah pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada pemerintah menjadi kemitraan model *multi-helix*. Dengan mengorkestrasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas, inisiatif ini berhasil memobilisasi beragam sumber daya dan kompetensi. Manifestasi nyata dari sinergi ini adalah terbentuknya Forum Relawan OKU Selatan Siaga (ForOKUSS), yang menciptakan sebuah ekosistem penanggulangan bencana yang mandiri dengan rasa kepemilikan kolektif yang kuat, menjadi kunci keberlanjutan program.

Selain itu, P3K berhasil menjawab kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dengan memberdayakan potensi lokal. Dengan memanfaatkan trainer internal yang telah bersertifikat, program ini menjadi model pelatihan yang berbiaya rendah, berkelanjutan, dan kontekstual. Lebih penting lagi, penelitian ini menyoroti adanya hubungan langsung antara pelatihan dengan aksi nyata di masyarakat. Program ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan pasif, melainkan mendorong relawan untuk segera mengaplikasikan ilmunya melalui kegiatan edukasi ke sekolah dan komunitas. Hal ini secara efektif mentransformasikan peran relawan dari sekadar tenaga responsif saat darurat menjadi agen mitigasi proaktif di masa damai, yang

secara langsung berkontribusi pada pencapaian target kinerja pemerintah daerah. Meskipun bersifat studi kasus, inisiatif ini menawarkan sebuah cetak biru yang terbukti dan inspiratif untuk penguatan kapasitas relawan di seluruh Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, N., et al. (2023). Disaster management policy analysis at the Regional Disaster Management Agency BPBD Palu City. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(7), 641. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i07.853>
- Ali, S., & George, A. (2021). Fostering disaster mitigation through community participation-case of Kochi residents following the Kerala floods of 2018 and 2019. *Natural Hazards*, 111(1), 389. <https://doi.org/10.1007/s11069-021-05058-0>
- Astuti, P., et al. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan secara liar di Kabupaten Dompu (Studi pada Balai Kesiaturan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi). *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1283. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6151>
- Chen, N., et al. (2022). Urban disaster risk prevention and mitigation strategies from the perspective of climate resilience. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022, 1. <https://doi.org/10.1155/2022/4907084>
- Dalimunthe, I. S., et al. (2024). Transformasi digital dan filsafat kepemimpinan dalam birokrasi: Tantangan dan peluang. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 597. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.4006>
- Ernawati, E., et al. (2025). Evaluasi model CIPP pada program pendidikan inklusif di SD. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 509. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.4869>
- Habibani, R. A., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi budaya organisasi publik dalam era digital: Peluang dan strategi implementasi. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 407. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5365>
- Hastanti, B. (2020). Analysis of vulnerability levels to the flash flood based on social economic and institutional factors in Wasior, Teluk Wondama, West Papua. *Jurnal Wasian*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.20886/jwas.v7i1.4785>
- Julianti, J., & Frinaldi, A. (2025). Menggali potensi inovasi budaya di lingkungan organisasi publik. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 351. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5371>
- Kardinasari, R., et al. (2019). Social sensitivity effect to public service competence and its impact on the head of sub-district performance in West Java Province. *Journal of Psychology Research*, 9(1). <https://doi.org/10.17265/2159-5542/2019.01.004>
- Kinanthi, R. (2022). Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan. *Community Development*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v6i1.14658>
- Kuswanto, P. H., et al. (2019). Risk management of flood disaster (A case study of Kendal River). *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 328(1), Article 12048. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/328/1/012048>
- Lee, Z. (2023). Overcoming challenges in corporate training: A framework for effective training initiatives. *Open Journal of Business and Management*, 11(5), 2472. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2023.115137>
- Marbi, S., & Widayat, T. N. E. (2025). Kapasitas kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

*SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 680.  
<https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6200>

Natalia, N., & Supardal, S. (2025). Kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera (Studi kasus di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat). *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 569.  
<https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5742>

Paramata, M. Z., et al. (2025). Pemanfaatan analisis spasial SIG: Perencanaan lokasi TPS 3R sebagai strategi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1270.  
<https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6425>

Pratama, T., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi budaya organisasi dan partisipasi pegawai dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik: Studi kasus pada dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari Kabupaten Agam. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 639. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5732>

Rafii, A. I. (2021). Harmonization of disaster management policies in disaster-prone areas (Study of policy implementation based on Regional Regulation of East Java Province Number 3 of 2010 on Disaster Management in East Java Province, Indonesia). *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 7(8), 1. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2021.34051>

Sendika, M., & Frinaldi, A. (2025). Transformasi budaya organisasi di sektor publik: Inovasi menuju pelayanan publik yang lebih responsif. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 371. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5376>

Subroto, D. E., et al. (2023). Implementasi teknologi dalam pembelajaran di era digital: Tantangan dan peluang bagi dunia pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(7), 473. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i07.542>

Suradi, S., et al. (2022). Synergy between disaster preparedness area program with local institutions for community disaster preparedness. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 1027(1), Article 12018. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1027/1/012018>

Tohani, E., et al. (2023). ICT training to improve CLC data management through nonformal education service program. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 94. <https://doi.org/10.22146/jpkm.72542>

Ulfia, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>

Uy, E. E. S., et al. (2020). Characterization of Cebu Province municipalities using Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) and Geographic Information System (GIS). *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 479(1), Article 12001. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/479/1/012001>

Virtriana, R., et al. (2022). Development of geospatial information integrated with big data to agricultural hazard monitoring in West Java. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 209. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-xlviii-m-2-2022-209-2022>

Zain, M. Z. A. B. M. (2022). Promoting Natural Hazards Triggering Technological Disasters (NATECH) in Malaysia. *Journal of Humanities and Education Development*, 4(4), 57. <https://doi.org/10.22161/jhed.4.4.9>